PERTUMBUHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH, PERTUMBUHAN BELANJA MODAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP FISCAL STRESS PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT

Anis Syifa
Anisyifa23@gmail.com

Dadang Suhendar
dadang.suhendar@uniku.ac.id

Dendi Purnama
dendi.purnama@uniku.ac.id

Universitas Kuningan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan pendapatan asli daerah, pertumbuhan belanja modal dan pertumbuhan ekonomi terhadap *fiscal stress* pada pemerintah Kabupaten/Kota se wilayah Jawa Barat periode 2016-2019. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/ kota se wilayah Jawa Barat, dengan unit analisis Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota Periode 2016-2019. Teknik pengambilsan sampel menggunakan sampel jenuh berjumlah 108 data laporan realisasi anggaran Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode verifikatif. Uji pemilihan model dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect*. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terhadap *Fiscal Stress*.

Kata Kunci: Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Fiscal stress.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sudah secara legal dan formal, tercantum didalam Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan provinsi/kota. Kedua undang-undang ini mengatur tentang penyerahan kekuasaan kepada pemerintah daerah dan juga mengeni pendanaan dalam pelaksanaan kewenangan yang diberikan tersebut. Selain itu, pada Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur perihal kewenangan dari Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan pada warga masyarakat guna mendapatkan sumber pendanaan bagi pembangunan daerah nya (Hastuti, 2018).

Otonomi daerah di satu sisi memberikan wewenang yang besar kepada pemerintah daerah, namun di satu sisi dapat memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan daerah. Buktinya yang ada setiap daerah memiliki tingkat kesiapan yang berbeda-beda, kabupaten/kota yang tidak memiliki potensi yang memuaskan, strategi ini sangat merepotkan mengingat tidak memiliki aset yang melimpah dan akan dianggap sulit untuk mendukung konsumsi lokal sehingga akan memicu kesulitan keuangan, tekanan pengeluaran/tekanan keuangan (Septira et al., 2019).

Arnett (2012) menyatakan bahwa *fiscal stress* seringkali dikaitkan dengan kondisi keuangan yang tidak baik atau krisis keuangan, dan defisit/tekanan anggaran. *Fiscal stress* akan terjadi saat dimana penerimaan negara atau daerah tidak mampu untuk memenuhi belanja atau pengeluaran negara/daerahnya sendiri. Dalam mendukung kebijakan pemerintah, dimana kebijakan yang beralih dari sistem sentralisasi pada sistem desentralisasi, maka pemerintah Daerah diharapkan mampu memaksimalkan semua potensi maupun kapasitas fiskalnya dalam upaya mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan menjadikan daerah otonom menjadi mandiri. Namun pada kenyataannya Pemerintah Daerah masih belum dapat melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan dari daerah sehingga masih tergantung pada Pusat. Hal ini mengakibatkan terjadinya *fiscal stress* di daerah terutama Kabupaten/Kota.

Berikut ini adalah hasil perhitungani *Fiscal Stress* di Kabupaten/Kota di Jawa Barat periode 2016-2019:

Tabel 1
Hasil Perhitungan *Fiscal Stress* di kaupaten/kota di jawa barat periode 2016-2019

No	Kabupaten/Kota	Tahun	*Fiscal Stress*	No	Kabupaten/Kota	Tahun	*Fiscal Stress*
1	kab. Bandung	2016	-3783678	15	Kab. Sumedang	2016	-2165094
		2017	-3975029			2017	-2069235
		2018	-4187352			2018	-2257904
		2019	-4756739			2019	-2559093
2	Kab. Bekasi	2016	-2981206	16	Kab. Tasikmalaya	2016	-3123860
		2017	-2534306			2017	-3008780
		2018	-2963332			2018	-3214816
		2019	-3108231			2019	-3505904
3	Kab. Bogor	2016	-4173124	17	Kota Bandung	2016	-3677658
		2017	-3833869			2017	-2963260
		2018	-4510398			2018	-3542857
		2019	-4610052			2019	-3763888
4	Kab. Ciamis	2016	-2256047	18	Kota Bekasi	2016	-2797105
		2017	-2302981			2017	-2993998
		2018	-2368304			2018	-3000598
		2019	-2428354			2019	-3125771
5	Kab. Cianjur	2016	-2924334	19	Kota Bogor	2016	-1331423
		2017	-3128886			2017	-1267392
		2018	-3431149			2018	-1494388
		2019	-3306709			2019	-1512559
6	Kab. Cirebon	2016	-2890377	20	Kota Cirebon	2016	-1100322
		2017	-2818757			2017	-9654896
		2018	-3096654			2018	-9856181
		2019	-3387334			2019	-1153087
7	Kab. Garut	2016	-3306206	21	Kota Depok	2016	-1832959
		2017	-3677678			2017	-1461415

		2018	-3835925			2018	-1704212
		2019	-4108045			2019	-1938263
8	Kab. Indramayu	2016	-2867030	22	Kota Sukabumi	2016	-8604867
		2017	-2726879			2017	-8011953
		2018	-2830597			2018	-8235280
		2019	-3301366			2019	-9771187
9	Kab. Karawang	2016	-2712771			2016	-1511983
		2017	-2748554	23	Kota Tasikmalaya	2017	-1509959
		2018	-3143511			2018	-1634900
		2019	-3316626			2019	-1629435
10	Kab. Kuningan	2016	-2246577	24	Kota Cimahi	2016	-1072694
		2017	-2245144			2017	-9554701
		2018	-2205287			2018	-1154056
		2019	-2349209			2019	-1140805
11	Kab. Majalengka	2016	-2302049	25	Kota Banjar	2016	-7616607
		2017	-2125042			2017	-6622011
		2018	-2341943			2018	-6877502
		2019	-2573198			2019	-7529226
12	Kab. Purwakarta	2016	-1453041	26	Kab. Bandung Barat	2016	-1936802
		2017	-1551415			2017	-1972002
		2018	-1551258			2018	-2221555
		2019	-1860638			2019	-2412905
13	Kab. Subang	2016	-2268987	27	Kab. Pangandaran	2016	-9124817
		2017	-2372790			2017	-1224168
		2018	-2531383			2018	-1050429
		2019	-2590387			2019	-1346678
14	Kab. Sukabumi	2016	-2839645				
		2017	-2875429				
		2018	-3258835				
		2019	-3461906				

Sumber: : djpk.kemenkeu.go.id (diolah peneliti 2021)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pemerintah di Kabupaten/Kota di Jawa Barat rata-rata masih mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan anggarannya, dimana Pendapatan Asli daerah belum mampu untuk menutupi total belanja daerahnya. Hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah daerah masih bergantung dalam memenuhi kebutuhan daerahnya kepada Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat mengalami *Fiscal Stress,* seperti yang dijelaskan oleh Arnett, (2012) ketika pendapatan asli daerah lebih besar dari total belanja daerah-nya maka hal ini menunjukan bahwa *fiscal stress* di daerah tersebut semakin kecil begitu juga sebaliknya. Dengan demikian perlu bagi pemerintah daerah untuk mengetahui paktor-paktor yang mempengaruhi Fiscal Stress.

Penelitian terkait pertumbuhan PAD dilakukan oleh Muda, (2012) dan Lhutfi et al., (2020) menyimpulkan bahwa pertumbuhan PAD berpengaruh Negatif terhadap *fiskal stress.* Berbeda dengan hasil penelitian Adriana et al., (2017) dan Dwitayanti et al., (2019) menemukan

bahwa pertumbuhan PAD tidak berpengaruh terhadap *Fiscal Stress.*

Penelitian terkait pertumbuhan Belanja Modal dilakukan oleh Firstanto, (2015) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja modal memiliki dampak negatif pada *fiscal stress.* Berbeda dengan hasil penelitian Septira et al., (2019) dan Dwitayanti et al., (2019) hasil penelitian menunjukan bahwa pertumbuhan belanja modal tidak berpengaruh terhadap *Fiscal Stress.*

Penelitian terkait pertumbuhan Ekonomi dilakukan oleh Arif, (2015) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diukur menggunakan PDRB berpengaruh negatif terhadap *fiscal stress*. Berbeda dengan hasil penelitian Adriana et al., (2017) dan Muda, (2012) hasil penelitian menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap *Fiscal Stress.*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan pendapatan asli daerah, pertumbuhan belanja modal dan pertumbuhan ekonomi terhadap *fiscal stress* pada pemerintah kabupaten/kota di jawa barat periode tahun 2016 sampai dengan 2019.

TELAAH TEORI DAN HIPOTESIS

Theory Stewardship

Menurut Donaldson & Davis (1989,1991) *Theory stewardship* merupakan teori yang mendeskripsikan situasi saat para manajer tidak terpengaruhi oleh tujuan individunya akan tetapi lebih dipokuskan kepada tujuan utama mereka untuk kepentingan organisasi. Implikasi *teory stewardship* dalam penelitian ini adalah dapat menjelaskan eksistensi dari pemerintahan daerah selaku lembaga yang dapat dipercaya oleh masyarakat dan dapat menampung aspirasi yang masyarakat diberikan oleh masyarakat, mampu menyediakan pelayanan yang baik bagi masyarakat, dan juga mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang dititpkan masyarakat kepadanya, sehingga tujuan dari ekonomi terpenuhi dan kesejahteraan masyarakat akan tercapai secara maksimal.

Pertumbuhan pendapatan asli

Fiscal Stress dapat terjadi karena dipicu oleh defisit anggaran dimana pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Kondisi *fiscal stress* menyebabkan Pemerintah Daerah berada pada kondisi yang belum mampu mendanai semua kebutuhan yang ada di daerah tersebut secara mandiri. Artinya, Pemerintah Daerah masih sangat tergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. hal ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah belum menggali sumber-sumber penghasilan yang ada di daerah secara optimal. Oleh sebab itu situasi *fiscal stress* ini menyebabkan Pemerintah Daerah untuk lebih menggali sumber-sumber penghasilan yang berpotensi untuk dijadikan sebagai Pendapatan Asli Daerah. Dengan adanya peningkatan dari Pendapatan Asli Daerah maka Pemerintah Daerah dapat mendanai pembangunan dan pelayanan publik di daerah tanpa mengandalkan bantuan dari Pusat, sehingga kondisi *fiscal stress* tersebut akan berkurang. Hal ini dipertegas dengan hasil penelitian yang dilakukan Muda, (2012) dan Lhutfi et al., (2020) dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD berpengaruh Negatif terhadap *fiskal stress*. Pemerintah daerah yang mengalami kondisi *fiscal stress* akan berupaya mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah sebagai bagian utama dalam penyusunan APBD sebagai upaya untuk meningkatkan pembiayaan.

H1: Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh Negatif terhadap *Fiscal Stress*

Pertumbuhan Belanja Modal

Dalam menghadapi otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk lebih meningkatkan pelayanan publiknya. Upaya ini akan terus mengalami perbaikan sepanjang didukung dengan pembiayaan daerah yang memadai. Belanja

pembangunan seperti halnya pembangunan dari infrastuktur pada jangka pendek akan memperbesar anggaran belanja daerah. Apabila belanja daerah atau belanja modal mengalami peningkatan namun tidak diikuti dengan tersedianya pembiayaan pembangunan yang besar maka akan dapat menimbulkan *fiscal stress* yang cukup serius, mengingat *fiscal stress* disini digambarkan dengan adanya ketidak seimbangan anggaran penerimaan dengan pengeluaran. Hal ini dipertegas oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Firstanto, (2015) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja modal memiliki dampak negatif pada *fiscal stress.* Penelitian ini dipertegas oleh Shamsub & Akoto, (2004) yang menyatakan bahwa belanja daerah yang tinggi identik dengan tingkat *fiscal stress* yang tinggi pula.

H_2: Pertumbuhan Belanja Modal berpengaruh Negatif terhadap *Fiscal Stress*.

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Badan Pusat Statistik (2021) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul dari berbagai aktivitas ekonomi didalam suatu periode tanpa memperhatikan ada atau tidaknya faktor produksi yang dimiliki oleh residen atau non-residen. Pertumbuhan PDRB ini dijadikan sebagai tolok ukur dalam menentukan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dengan PDRB yang meningkat menunjukan aktifitas ekonomi masyarakat yang meningkat pula. Semakin tinggi aktifitas ekonomi yang dilakukan, akan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Artinya dengan PDRB yang tinggi maka daerah akan mampu membiayai kebutuhannya sendiri dan memiliki kemampuan ekonomi yang cukup baik. Dengan kemakmuran masyarakat di daerah, maka kondisi *fiscal stress* pada daerah akan berkurang. Hal ini dipertegas oleh hasil penelitian Arif, (2015) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diukur menggunakan PDRB berpengaruh negatif terhadap *fiscal stress*. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan menurunkan angka *fiscal stress*.

H_3: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh Negatif terhadap *Fiscal Stress*.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini seluruh pemerintah kabupaten/ kota se wilayah Jawa Barat dengan unit analisis laporan realisasi anggaran pemerintah Kabupaten/Kota Periode 2016-2019. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh. Sehingga data observasi penelitian berjumlah 108 amatan dengan periode 4 tahun dikali 27 Kabupaten/Kota.

Tabel 2
Oprasional Variabel

No	Variabel	Indikator	Skala
1	*Fiscal Stress*	*FS* = PAD - total belanja daerah (Arnett, 2012)	Rasio
2	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	PPAD (t) = (PADt - PADt-$_1$) /PADt-$_1$ x 100% (Firstanto, 2015)	Rasio
3	Pertumbuhan Belanja Modal	PBM(t) = (BMt - BMt-$_1$)/BMt-$_1$ x 100 % (Firstanto, 2015)	Rasio
4	Pertumbuhan Ekonomi	PPDRB (t) = (PDRBt - PDRBt-$_1$)/PDRBt-$_1$ x 100 % (Firstanto, 2015)	Rasio

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder laporan realisasi anggaran pemerintah Kabupaten/Kota Periode 2016-2019 yang diperoleh dari website djpk.kemenkeu.go.id. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis verifikatif meliputi uji asumsi klasik, regresi data panel, koefisien determinasi, dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Tabel 3
Hasil statistik deskriptif ditunjukkan dalam

	Min	Max	Mean	Standar deviasi
FS	-4.756739	-6.622011	-2.406173	1.010404
PPAD	-0.391000	0.857000	0.106491	0.232277
PBM	-0.452000	0.935000	0.056241	0.253001
PE	-0.090000	0.076000	0.028037	0.049851

Sumber : *Output Eviews 9.0*

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijelaskan hasil mengenai analisis statistika sebagai berikut:

1. *Fiscal stress (FS)*
   Variabel *fiscal stress* memiliki nilai minimum sebesar -4.756739 pada Kabupaten Bandung pada tahun 2019, nilai maximum sebesar -6.622011 pada Kota Banjar pada tahun 2017, Nilai rata-rata *Fiscal Stress* adalah -2.406173. serta nilai simpangan baku sebesar 1.010404.
2. Pertumbuhan pendapatan asli daerah (PPAD)
   Variabel pertumbuhan pendapatan asli daerah (X1) memiliki nilai minimum sebesar -0.391000 pada Kabupaten Garut pada tahun 2018, nilai maximum sebesar 0.857000 pada Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2017, Nilai rata-rata pertumbuhan pendapatan asli daerah adalah 0.106491. serta nilai simpangan baku sebesar 0.232277.
3. Pertumbuhan belanja modal (PBM)
   Variabel pertumbuhan belanja modal (X2) memiliki nilai minimum sebesar -0.452000 pada Kabupaten Purwakarta pada tahun 2018, nilai maximum sebesar 0.935000 pada Kabupaten Pangandaran pada tahun 2017, Nilai rata-rata pertumbuhan belanja modal adalah 0.056241. serta nilai simpangan baku sebesar 0.253001
4. Pertumbuhan ekonomi (PE)
   Variabel pertumbuhan ekonomi (X3) memiliki nilai minimum sebesar -0.090000 pada kota Depok pada tahun 2016, nilai maximum sebesar 0.076000 pada Kota Cimahi pada th 2019, Nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi adalah 0.028037. serta nilai simpangan baku (standar deviasi) sebesar 0.049851.

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas

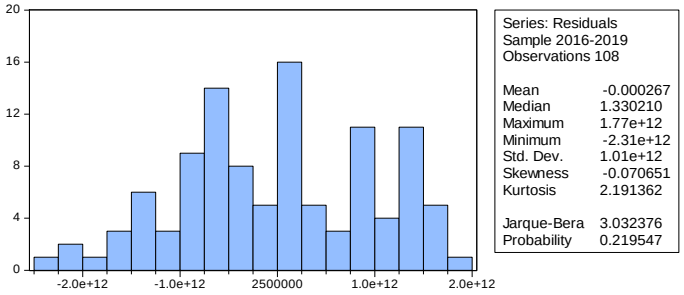

Sumber: *Output Eviews 9.0*

Grafik 1
Hasil Uji Normalitas

Hasil uji normalitas di atas, menunjukkan nilai ρ-value adalah 0,219547 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal, sehingga data tersebut memenuhi uji normalitas.

Heteroskedasticity Test: White			
F-statistic	0.863758	Prob. F(9,98)	0.5601
Obs*R-squared	7.937430	Prob. Chi- Square(9)	0.5405
Scaled explained SS	4.384427	Prob. Chi- Square(9)	0.8843

Hasil Uji Heterokedasitas

Sumber: *Output Eviews 9.0*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat *p-value obs*Rsquare* adalah 0.5405 > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Hasil uji multikolinearitas

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1.538056	1.585856	NA
PPAD	1.834012	1.225248	1.010802
PBM	1.580611	1.085072	1.033523
PDRB	4.046671	1.355276	1.027291

Sumber: *Output Eviews 9.0*

Berdasarkan tabel 4.10 didapatkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai VIP < 10 artinya bahwa tidak terjadi Multikolinieritas dalam model Regresi.

Hasil uji autokorelasi

Tabel 5
Hasil Uji Autokolerasi

F-statistic	4.417013	Durbin-Watson stat	2.1731
Prob(F-statistic)	0.005785		

Sumber: *Output Eviews 9.0*

Hasil nilai uji autokolerasi menunjukkan nilai hitung Durbin Watson sebesar 2.1731, maka Tabel Durbin Watson menunjukkan bahwa nilai DL = 1,6277, nilai Dw : 2.173069, nilai dU : 1,7428, dan nilai 4-dU (4 - 1,7428) = 2,2572. Maka : dL < dw < 4-dU = (1,6277 < 2.173069 < 2,2572). Berdasarkan hasil dari kriteria bahwa dL < dw < 4-dU = (1,6277 < 2.173069 < 2,2572). sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi.

Hasil uji heterokedastisitas

Tabel 6

Hasil Uji Koefisien Determinasi

.

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.9737	Mean dependent var	-2.406.173
Adjusted R-squared	0.9639	S.D. dependent var	1.010.404

Sumber : *Output Eviews 9.0*

Dari tabel diatas terlihat nilai *adjusted R-Square* adalah 0.9639. Nilai ini berarti bahwa sebesar 96,39% perubahan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel Pertumbuhan pendapatan asli daerah, pertumbuhan belanja modal dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan sisanya 3,62% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

Uji hipotesis

F-statistic	99.458	Prob(F-statistic)	0.000

Pengujian Secara Simultan (Uji F)

Tabel 8
Uji Simultan (Uji F)
Sumber : *Output Eviews 9.0*

Dari tabel atas terlihat bahwa nilai F hitung sebesar 99.458 dengan tingkat

signifikansi 0.000. Dengan menggunakan tingkat α (0,05) atau 5% dan derajat kebebasan maka diperoleh Ftabel sebesar 2,69, nilai Fhitung > Ftabel (99.4583 > 2,69) dan nilai signifikansi Fhitung lebih kecil dari α (0.000 < 0,05), sehingga Ho ditolak dan Ha diterima dan dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan pendapatan asli daerah, pertumbuhan belanja modal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara simultan terhadap *Fiscal Stress*.

Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Tabel 9
Uji Parsial (Uji t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.263765	0.197018	-4.837397	0.0000
PPAD?	-8.583465	0.001482	-2.061000	0.0426
PBM?	-3.135518	0.015668	-4.030232	0.0001
PDRB?	-1.550674	0.043842	-4.013353	0.0001

Sumber : *Output Eviews 9.0*

- Pengujian Hipotesis Pertama

  Nilai t-hitung sebesar –2.061000 dan nilai t-tabel 1,65950. Jika dibandingkan –t hitung < –t tabel yaitu –2.061000 < –1,65950 dengan tingkat signifikansi 0.0426 < 0,05 artinya H_0 ditolak dan Ha diterima, artinya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Fiscal Stress.*
- Pengujian Hipotesis Kedua

  Nilai t-hitung sebesar -4.030232 dan nilai t-tabel 1,65950. Jika dibandingkan –t hitung < –t tabel yaitu -4.030232 < –1,65950 dengan tingkat signifikansi 0.0001 < 0,05 artinya H_0 ditolak dan Ha diterima, artinya Pertumbuhan Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Fiscal Stress.*
- Pengujian Hipotesis Ketiga

  Nilai t-hitung sebesar -4.013353 dan nilai t-tabel 1,65950. Jika dibandingkan –t hitung < –t tabel yaitu -4.013353 < –1,65950 dengan tingkat signifikansi 0.0001 < 0,05 Artinya artinya H_0 ditolak dan Ha diterima, artinya Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Fiscal Stress.*

PEMBAHASAN

Pengaruh Pertumbuhan PAD Terhadap *Fiscal Stress*

Berdasarkan uji t diketahui bahwa variabel pertumbuhan pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Fiscal Stress*. Artinya setiap terjadi kenaikan pertumbuhan pendapatan asli daerah akan diikuti oleh turunnya *fiscal stress*. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah diharapkan Pemerintah Daerah dapat mendanai pembangunan dan pelayanan publik di daerah secara mandiri tanpa mengandalkan bantuan dari Pusat. Semakin besar sumber pendapatan yang dihasilkan dari potensi yang dimiliki oleh daerah, maka akan semakin leluasa pemerintah daerah untuk menyediakan semua kepentingan masyarakatnya tanpa dibebani oleh kepentingan Pemerintah Pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Kewenangan pemerintah daerah untuk pelaksanaan kebijakannya sebagai daerah otonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam menghasilkan pendapatan asli daerah di daerah tersebut. Dengan menaikan pendapatan daerah diharapkan pemerintah dapat lebih meminimalisir ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan menghindari terjadinya terjadinya *Fiscal Stress.* Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lhutfi et al., (2020) dan Muda, (2012) dimana pertumbuhan pendapatan asli daerah berpengaruh Negatif terhadap *Fiscal Stress.*

Pengaruh Pertumbuhan Belanja Modal Terhadap *Fiscal Stress*

Berdasarkan uji t diketahui bahwa variabel pertumbuhan belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Fiscal Stress*. Artinya setiap terjadi kenaikan pertumbuhan belanja modal akan diikuti oleh penurunan *fiscal stress*. Dalam menghadapi otonomi daerah , pemerintah daerah diotuntut untuk lebih mampu dalam

meningkatkan pelayanan publiknya. Usaha dalam peningkatan pelayanan publik ini akan semakin baik jika mendapatkan dukungan dari segi tingkat pembiayaan yang baik pula. Perubahan pembiayaan lebih banyak disebabkan adanya tuntutan meningkatkannya pelayanan publik di suatu daerah yang ditunjukkan dengan peningkatan dana alokasi atau terjadinya pergeseran dari belanja daerah untuk lebih mementingkan kepentingan pelayanan publik secara langsung, Pada jangka panjang dengan semakin meningkatkannya kualitas infrastruktur suatu daerah pada akhirnya akan memotivasi masyarakat untuk dapat bekerja dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan fiskal jangka panjang maupun jangka pendek daerahnya. Hal ini membuktikan bahwa pertumbuhan belanja daerah dapat mempengaruhi Fiscal Stress. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Firstanto, (2015) dimana pertumbuhan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap *Fiscal Stress.*

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap *Fiscal Stress*

Berdasarkan uji t diketahui bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Fiscal Stress*. Artinya setiap terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh penurunan *fiscal stress*.

Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan menggunakan PDRB suatu daerah maka akan menyebabkan peningkatan kesempatan kerja yang ada, kesejahteraan masyarakat, produktivitas masyarakat. Maka dengan meningkatnya produk domestik regional bruto dapat mengurangi timbulnya fenomena fiscal stress.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Arif, (2015) serta penelitian Shamsub & Akoto, (2004) dimana pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatifterhadap *Fiscal Stress.*

SIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan maka simpulan penelitian ini adalah

1. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Fiscal Stress*. Artinya semakin tinggi tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah, maka *Fiscal Stress* akan semakin rendah.
2. Pertumbuhan belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Fiscal Stress*. Artinya semakin semakin tinggi tingkat pertumbuhan belanja modal, maka *Fiscal Stress* akan semakin rendah.
3. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Fiscal Stress.* Artinya semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi , maka *Fiscal Stress* akan semakin rendah.

SARAN

Dari simpulan yang telah diuraikan maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintah daerah agar terus menggali potensi yang ada di daerah dan lebih mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah yang sudah ada, misalnya di bidang pariwisata dan perhotelan.
2. Pemerintah daerah dapat lebih menggeser komposisi belanja khususnya dalam peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Pada jangka panjang dengan peningkatan kualitas infrastruktur suatu daerah pada gilirannya akan dapat mengurangi tigkat *fiscal stress* yang terjadi.
3. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah untuk terus memberdayakan pelaku usaha agar tetap eksis dan lebih maju sehingga dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
4. Untuk peneliti selanjutnya untuk menambah variabel independen yang

tidak diteliti dan memperluas objek amatan penelitian.

DAFTAR FUSTAKA

Adriana, M., Muthia basri, Y., & Indrawati, N. (2017). Variabel Yang Mempengaruhi Fiscal Stress Di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau. *JURNAL EKONOMI*, *25*(2), 45–60.

Arif, A. (2015). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fiscal Stress Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia*.

Arnett, S. (2012). *Fiscal Stress in the U.S. States: An Analysis of Measures and Fiscal Stress in the U.S. States: An Analysis of Measures and Responses*.

Donaldson, L., & Davis, J. H. (n.d.). *Stewardship Theory or Agency Theory: June 1991*, 49–65.

Dwitayanti, Y., Nurhasanah, & Armaini, R. (2019). Determinan Fiscal Stress Pemerintah Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya*.

Firstanto, R. (2015). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pad, Pdrb, Dan Belanja Modal Terhadap Fiscal Stress Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Universitas Diponegoro Semarang*.

Hastuti, P. (2018). Desentralisasi fiskal dan stabilitas politik dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah di indonesia. *SNKN 2018 | SIMPOSIUM NASIONAL KEUANGAN NEGARA*, 784–799.

Lhutfi, I., Ritchi, H., & Yudianto, I. (2020). Do the Growth of Original Local Government Revenues and the Growth of Capital Expenditure Affect Fiscal Stress ? *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, *23*(1), 1–11. https://doi.org/10.14414/jebav.v23i1.1727.A

Muda, I. (2012). Variabel Yang Mempengaruhi Fiscal Stress Pada Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *Jurnal Keuangan & Bisnis*, *4*(1).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Th 2006. (2006). *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Septira, F., Farida, I., & Prawira, A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fiscal Stress. *JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, *7*(1), 57–64.

Shamsub, H., & Akoto, J. B. (2004). *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*. *16*(1), 40–61.

Undang-undang No.23. (2014). *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Undang-undang No.33. (2004). *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*.

undang-undang no 28 tahun 2009. (2009). *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Adriana, M., Muthia basri, Y., & Indrawati, N. (2017). Variabel Yang Mempengaruhi Fiscal Stress Di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau. *JURNAL EKONOMI*, *25*(2), 45–60.

Arif, A. (2015). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fiscal Stress Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia*.

Arnett, S. (2012). *Fiscal Stress in the U.S. States: An Analysis of Measures and Fiscal Stress in the U.S. States: An Analysis of Measures and Responses*.

Donaldson, L., & Davis, J. H. (n.d.). *Stewardship Theory or Agency Theory: June 1991*, 49–65.

Dwitayanti, Y., Nurhasanah, & Armaini, R. (2019). Determinan Fiscal Stress Pemerintah Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya*.

Firstanto, R. (2015). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pad, Pdrb, Dan Belanja Modal Terhadap Fiscal Stress Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Universitas Diponegoro Semarang*.

Hastuti, P. (2018). Desentralisasi fiskal dan stabilitas politik dalam kerangka

pelaksanaan otonomi daerah di indonesia. *SNKN 2018 | SIMPOSIUM NASIONAL KEUANGAN NEGARA*, 784–799.

Lhutfi, I., Ritchi, H., & Yudianto, I. (2020). Do the Growth of Original Local Government Revenues and the Growth of Capital Expenditure Affect Fiscal Stress ? *Journal of Economics, Business, and Accountancy Ventura*, *23*(1), 1–11. https://doi.org/10.14414/jebav.v23i1.1727.A

Muda, I. (2012). Variabel Yang Mempengaruhi Fiscal Stress Pada Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *Jurnal Keuangan & Bisnis*, *4*(1).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Th 2006. (2006). *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Septira, F., Farida, I., & Prawira, A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fiscal Stress. *JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, *7*(1), 57–64.

Shamsub, H., & Akoto, J. B. (2004). *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*. *16*(1), 40–61.

Undang-undang No.23. (2014). *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Undang-undang No.33. (2004). *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*.

undang-undang no 28 tahun 2009. (2009). *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

www.djpk.kemenkeu.go.id

https://jabar.bps.go.id/